

## **Analisis Laporan Arus Kas Sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan di Provinsi Sulawesi Utara**

### *Analysis of Cash Flow Reports as a Tool for Measuring Financial Performance in North Sulawesi Province*

**Vira Wagimin<sup>1</sup>, Jenny Morasa<sup>2</sup>, dan Wulan Kindangen<sup>3</sup>**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail :

[ira.wagimin@gmail.com](mailto:ira.wagimin@gmail.com)<sup>1</sup>, [jennymorasa@unsrat.ac.id](mailto:jennymorasa@unsrat.ac.id)<sup>2</sup>, [wulankindangen@unsrat.ac.id](mailto:wulankindangen@unsrat.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak:** Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan laporan arus kas dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang bersumber dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada Laporan Arus Kas pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018-2021, menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018-2021 dalam keadaan cukup baik.

**Kata Kunci:** Analisis Laporan Arus Kas, Kinerja Keuangan, Laporan Arus Kas

**Abstract:** *The cash flow report is a part of the financial report the present information on cash receipts and disbursements during a certain period which is classified based on operating, investing, financing and transitory activities. This research aims to analyze the use of cash flow reports in measuring the financial performance of the regional government of North Sulawesi Province. The type of research used in this research is qualitative research. The type of data used is quantitative data sourced from the Regional of North Sulawesi Province. The results of the research based on the analysis conducted on the Cash Flow Reports of the North Sulawesi Provincial Government for the years 2018-2021, show that the financial performance of the North Sulawesi Provincial Government for 2018-2021 was quite good.*

**Keywords:** *Cash Flow Statement Analysis, Financial Performance, Cash Flow Statement*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Salah satu keberhasilan otonomi daerah adalah pemerintah daerah telah bekerja keras menerapkan pengelolaan keuangan yang taat akan hukum (Susilawati, Kusumastuti dan Fajar 2018). Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, akuntabel dan transparan merupakan komponen penting dalam pembangunan daerah. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan terkait sangat penting bagi pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tata kelola yang baik, yang ditandai dengan pemerintahan yang efisien, ekonomis, responsif dan bertanggungjawab serta fleksibilitas dalam penggunaan APBD. Sehingga diharapkan pemerintah daerah mampu menggali sumber PAD sebanyak-banyaknya (Siswanto dan Dita, 2022). Pemerintah daerah di Indonesia, seperti kabupaten dan kota, memiliki sumber daya finansial yang beragam, termasuk dari dana alokasi umum,

pendapatan asli daerah, dan sumber-sumber pendanaan lainnya seperti pinjaman dan hibah. Namun, pengelolaan yang tidak efisien sering kali menyebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban keuangan dasar seperti pembayaran gaji pegawai, peningkatan infrastruktur, dan pelayanan masyarakat. Tetapi, keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dikelola secara optimal telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kesembilan kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan keuangan digunakan untuk menganalisis efisiensi dan efektivitas suatu pelaporan, membantu menentukan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan, memeriksa kondisi keuangan dan memperkirakan nilai sumber daya ekonomi yang digunakan untuk melaksanakan tugas operasional pemerintahan. Salah satu laporan keuangan yang wajib disusun oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah Laporan Arus Kas. Laporan arus kas merupakan instrumen yang memungkinkan pemerintah daerah untuk memantau arus kas masuk dan keluar uang tunai selama periode tertentu. Hal ini memberikan gambaran yang lebih tepat tentang keberlanjutan keuangan, efektivitas dalam mengelola kas, serta dampak dari kebijakan fiskal yang diterapkan.

Laporan arus kas berfungsi sebagai alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam beberapa aspek yaitu likuiditas yang mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, solvabilitas mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi semua kewajiban jangka panjang termasuk utang dan kewajiban lainnya, fleksibilitas mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk menyesuaikan arus kasnya dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi atau kebutuhan mendesak lainnya, yang terakhir akuntabilitas dan transparansi memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana kas digunakan dan bagaimana alokasi dana dilakukan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Analisis Laporan Arus Kas Sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan di Provinsi Sulawesi Utara.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan laporan arus kas dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Akuntansi**

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2019: 1) akuntansi adalah ilmu mencatat, menganalisis, dan mengkomunikasikan transaksi atau kejadian ekonomi suatu entitas bisnis, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan.

### **Akuntansi Pemerintahan**

Pramudiana (2018:23) mengatakan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai suatu proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atau hasil dari proses yang dilakukan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

### **Laporan Keuangan**

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional

pemerintah menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

### **Laporan Arus Kas**

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (2021:PSAP No.03) Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Penyajian laporan arus kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas. Tujuan laporan arus kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transitoris selama satu periode akuntansi. Pemerintah daerah menyusun laporan arus kas sesuai dengan kebijakan akuntansi dan menyajikan laporan tersebut sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi berlaku untuk penyusunan laporan arus kas Pemerintah Daerah yang disusun oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD).

### **Analisis Laporan Arus Kas**

Analisis laporan arus kas pemerintah daerah terhadap total pendapatan mencakup seluruh penerimaan kas yang diperoleh dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris dalam periode tertentu. Total pendapatan ini merupakan indikator penting untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan dana untuk mendukung operasional, investasi dan pendanaan. Pendapatan operasional yang stabil atau meningkat menunjukkan kesehatan keuangan pemerintah daerah, sementara pendapatan dari investasi dan pendanaan menunjukkan kemampuan untuk mendanai pengembangan aset dan memenuhi kewajiban jangka panjang.

- a. Dalam arus kas dari aktivitas operasi, tingginya rasio arus kas operasional menunjukkan bahwa daerah memiliki arus kas yang memadai dari operasional untuk mendukung aktivitas sehari-hari tanpa bergantung pada utang.
- b. Dalam arus kas dari aktivitas investasi, arus kas investasi yang positif atau signifikan menunjukkan bahwa pemerintah daerah aktif dalam pembangunan infrastruktur atau investasi lain yang dapat meningkatkan pelayanan publik dan pendapatan masa depan.
- c. Dalam arus kas dari aktivitas pendanaan, arus kas pendanaan yang sehat menunjukkan bahwa daerah mengelola utang dan pembiayaan dengan baik, tidak bergantung berlebihan pada utang untuk membiayai operasional atau investasi.
- d. Dalam arus kas dari aktivitas transitoris, jika mengalami peningkatan terhadap total pendapatan menunjukkan efektivitas dalam mengelola dana khusus atau hibah yang bersifat sementara dapat berdampak pada stabilitas keuangan jangka pendek dan panjang.

Analisis laporan arus kas pemerintah daerah terhadap total pengeluaran bertujuan untuk memahami bagaimana kas digunakan dan dikelola oleh pemerintah daerah, serta seberapa efisien pemerintah dalam mengelola pengeluarannya.

- a. Dalam arus kas dari aktivitas operasi, tingginya rasio arus kas operasional terhadap pengeluaran operasional menunjukkan bahwa daerah memiliki arus kas yang memadai untuk menutupi pengeluaran rutin tanpa bergantung pada utang.
- b. Dalam arus kas dari aktivitas investasi, arus kas investasi yang seimbang dengan pengeluaran investasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mendanai proyek-proyek investasinya tanpa mengganggu kestabilan fiskal.

- c. Dalam arus kas dari aktivitas pendanaan, aktivitas pendanaan yang wajar menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengelola utang dan pembiayaan yang baik tidak bergantung berlebihan pada utang untuk menutupi pengeluaran.
- d. Dalam arus kas dari aktivitas transitoris, tingginya tingkat pengeluaran menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada sumber daya sementara.

Analisis arus kas bersih merupakan alat penting untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Arus kas bersih yang positif menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan mungkin akan menyimpan atau menginvestasikan surplus tersebut. Sebaliknya, arus kas bersih yang negatif bisa menjadi tanda peringatan bahwa pemerintah daerah mungkin menghadapi kesulitan likuiditas, yang perlu segera ditangani.

Laporan arus kas berfungsi sebagai alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam beberapa aspek berikut :

1. Likuiditas
2. Solvabilitas
3. Fleksibilitas
4. Akuntabilitas dan transparansi

### **Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundangan. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah merupakan bagian dari pengukuran kinerja keuangan sektor publik yang merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi memulai alat ukur finansial dan non finansial (Mardiasmo, 2018:151).

### **Penelitian Terdahulu**

Dwi Nurrahmawati, Erni Agustin, Risma Wira Bharata (2023) dengan judul Analisis Laporan Arus Kas Sebagai Alat Ukur Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2018-2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui bahwa keseluruhan pertumbuhan arus kas tahun 2018-2021 atas aktivitas operasi, investasi, pembiayaan serta transitoris menunjukkan adanya kinerja keuangan yang cukup baik dari pemerintah kota Magelang. Selain itu, arus kas bebas yang relatif cukup tinggi mampu mengindikasikan bahwa pemerintah kota Magelang memiliki sisa kas yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas-aktivitas yang digunakan untuk menunjang pelayanan terhadap masyarakat yang berkualitas tinggi.

Siti Hasanah, Khaerul Umam, Fitri Pebriani Wahyu (2022) dengan judul Analisis Laporan Arus Kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018-2020. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan arus kas secara keseluruhan 2018-2020 dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan menunjukkan kinerja keuangan di Pemerintah Daerah Kota Bekasi kurang baik dan dari analisis arus kas bebas diperoleh hasil pada tahun 2018-2020 terjadi penurunan arus kas bebas yang menurun karena adanya arus kas bebas yang menurun menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tersebut mengalami kesulitan keuangan.

Widodo dan Kusumawati (2020) dengan judul Evaluasi Likuiditas, Solvabilitas dan Fleksibilitas dalam Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa dalam hal likuiditas, Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki tingkat likuiditas yang cukup baik, meskipun terdapat beberapa tahun dengan rasio likuiditas yang rendah. Untuk solvabilitas, indikator solvabilitas Kabupaten Bantul relatif stabil dan menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, bertujuan untuk menganalisis laporan arus kas sebagai alat ukur kinerja keuangan di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan kenyataan dari yang diteliti, sehingga memudahkan untuk mendapatkan data yang objektif dalam memahami laporan arus kas sebagai alat ukur kinerja keuangan.

### Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, berupa laporan arus kas tahun 2018-2021 yang telah di audit.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data, selanjutnya dapat diambil dan diolah sesuai kebutuhan peneliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara

Peneliti melakukan tanya jawab dengan staf Badan keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengenai informasi profil, sejarah, struktur organisasi dan laporan arus kas.

2. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan cara mempelajari dokumen, catatan atau bukti-bukti yang berkaitan dengan laporan arus kas di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Analisis Laporan Arus Kas

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Data arus kas dari aktivitas operasi selama tahun 2018-2021 yang diambil dari pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara yang mencakup penerimaan dan pengeluaran operasional. Arus kas bersih dari aktivitas operasional pada tahun 2018 adalah 845.082.403.511,79, tahun 2019 sebesar 679.535.603.078,67, tahun 2020 sebesar 280.077.710.289,59 dan tahun 2021 sebesar 636.281.092.837,81.

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Data arus kas dari aktivitas investasi selama tahun 2018-2021 yang diambil dari pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara yang mencakup pendapatan dan pengeluaran. Arus kas bersih dari aktivitas investasi tahun 2018 sebesar - 771.522.643.237, tahun 2019 sebesar -915.804.497.788, tahun 2020 sebesar - 1.091.033.905.420 dan tahun 2021 sebesar -1.031.338.720.772,50.

3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Data arus kas dari aktivitas pendanaan selama tahun 2018-2021 yang diambil dari pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara yang mencakup pendapatan dan pengeluaran. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris tahun 2018 tidak memiliki arus kas masuk dan keluar, tahun 2019 sebesar 57.670.440.963, tahun 2020 sebesar 753.158.252.319 dan tahun 2021 sebesar 561.765.048.472.

#### 4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Data arus kas dari aktivitas transitoris selama tahun 2018-2021 yang diambil dari pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara yang mencakup pendapatan dan pengeluaran. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris tahun 2018 sebesar 473.986.793, tahun 2019 sebesar 1.293.962.519,92, tahun 2020 sebesar - 8.017.657.192,47 dan tahun 2021 sebesar -1.017.557.619.

#### Laporan Arus Kas Sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan

##### 1. Likuiditas

Dengan cara menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup dari operasi sehari-hari untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, contohnya membayar gaji pegawai, membayar program-program pemerintah, dan memenuhi kewajiban lain tanpa perlu mengandalkan sumber pendapatan eksternal. Semakin positif arus kas dari aktivitas operasi, semakin baik likuiditas pemerintah, karena menunjukkan bahwa pemerintah mampu memenuhi kewajiban keuangan dengan sumber daya yang dimiliki. Arus kas dari aktivitas operasi yang positif dan konsisten, dapat mencerminkan bahwa pemerintah memiliki likuiditas yang baik, artinya pemerintah memiliki kas yang cukup untuk menutupi pengeluaran operasional dan kewajiban jangka pendek lainnya tanpa harus meminjam atau menjual aset.

##### 2. Solvabilitas

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan sejauh mana pemerintah bergantung pada utang untuk membiayai defisit anggaran dan investasi jangka panjang. Jika arus kas dari aktivitas pendanaan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pinjaman, bisa menjadi indikator meningkatnya risiko keuangan jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan dapat mengindikasikan kemampuan pemerintah dalam melunasi utang jatuh tempo. Jika arus kas dari aktivitas pendanaan lebih banyak digunakan untuk membayar utang yang sudah ada dari pada untuk investasi produktif, ini dapat menunjukkan adanya risiko likuiditas dan tekanan fiskal jangka panjang. Ketergantungan pada penerbitan utang baru untuk melunasi utang lama tanpa adanya perbaikan dalam arus kas operasi dapat memperburuk risiko keuangan pemerintah di masa yang akan datang.

Salah satu indikator bahwa pemerintah memiliki solvabilitas yang baik adalah kemampuan untuk membayar utang jatuh tempo dari arus kas operasional tanpa perlu mengambil utang baru. Jika arus kas dari aktivitas pendanaan menunjukkan bahwa pemerintah lebih sering menggunakan dana untuk melunasi utang dari pada mengambil utang baru, menandakan posisi keuangan yang baik dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Indikatornya yaitu penurunan bertahap dalam jumlah pinjaman atau penerbitan obligasi seiring dengan peningkatan arus kas dari aktivitas operasi dan investasi. Jika pemerintah secara konsisten mengurangi ketergantungan pada pembiayaan eksternal dan menggunakan lebih banyak dana dari surplus anggaran untuk membiayai proyek-proyek baru atau untuk melunasi utang, ini menunjukkan solvabilitas yang baik.

##### 3. Fleksibilitas

Pemerintah dapat menyesuaikan arus kasnya dengan melakukan realokasi anggaran, yaitu mengalihkan dana dari pos-pos yang kurang penting ke kebutuhan yang lebih mendesak atau yang timbul akibat perubahan kondisi ekonomi. Misalnya, terjadi krisis ekonomi, pemerintah bisa mengurangi belanja modal atau proyek infrastruktur yang belum mendesak, dan mengalokasikan dana tersebut untuk program ekonomi atau bantuan sosial. Pemerintah dapat menyesuaikan arus kasnya dengan mengatur ulang anggaran, memprioritaskan pengeluaran yang lebih mendesak, dan mencari sumber pendanaan tambahan seperti utang atau dana cadangan untuk menghadapi perubahan kondisi ekonomi atau kebutuhan mendesak.

Pemerintah dapat meningkatkan fleksibilitas keuangan dengan memperluas basis pajak dan meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak, serta membangun dan mempertahankan cadangan fiskal, seperti dana cadangan. Pemerintah dapat meningkatkan fleksibilitas keuangan dengan cara

memperluas basis pajak, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, serta mengalokasikan dana untuk cadangan atau investasi yang dapat digunakan saat diperlukan.

#### 4. Akuntabilitas dan Transparansi

Laporan arus kas membantu memastikan bahwa alokasi dana dilakukan secara tepat dan efektif dengan memberikan gambaran yang jelas tentang sumber dan penggunaan kas, sehingga pemerintah dapat memantau ketersediaan dana dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Dengan menggunakan laporan arus kas, pemerintah dapat memantau arus kas secara berkala, pemerintah dapat menghindari penundaan dalam pembiayaan proyek penting atau dalam membayar kewajiban seperti utang dan gaji pegawai. Dapat memastikan bahwa alokasi dana efektif dalam menjaga kelancaran operasional pemerintahan tanpa terganggu oleh masalah likuiditas.

### **Pembahasan**

#### Analisis Laporan Arus Kas

##### 1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Secara keseluruhan, penurunan peningkatan arus kas bersih dari aktivitas operasi pemerintah daerah dapat menimbulkan dampak yang luas dan mempengaruhi stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini, seperti meningkatkan efisiensi pengeluaran, mencari sumber pendapatan baru, dan meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Namun, jika dilihat secara keseluruhan dalam arus kas dari aktivitas operasi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara masih bisa menangani penurunan peningkatan ini dengan baik, dapat dilihat dari total pendapatan dan pengeluaran yang stabil.

##### 2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih negatif menunjukkan komitmen terhadap investasi jangka panjang, meskipun berdampak pada likuiditas jangka pendek. Namun, arus kas bersih dari aktivitas investasi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara dioptimalkan dengan baik, karena mendukung pembangunan infrastruktur, meningkatkan aset jangka panjang, dan pemerintah memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah. Jika dilihat secara keseluruhan dalam arus kas aktivitas investasi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara cukup signifikan.

##### 3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Secara keseluruhan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara bisa menjaga keseimbangan antara pendapatan operasional dan kebutuhan pendanaan, serta dapat menghindari risiko keuangan. Pemerintah Daerah juga mampu untuk melunasi utang tanpa mengganggu operasional sehari-hari adalah indikator penting dari manajemen keuangan yang baik. Namun, tidak adanya aktivitas pendanaan mungkin membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan investasi besar dalam infrastruktur, yang bisa menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

##### 4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Peningkatan penerimaan yang terjadi menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil mendapatkan lebih banyak dana dari sumber-sumber seperti hibah, pinjaman sementara, atau pengembalian pajak yang signifikan. Pemerintah daerah juga memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam mengelola keuangan daerah. Peningkatan pengeluaran dari aktivitas transitoris dapat menunjukkan ketergantungan pada pendanaan sementara atau proyek tertentu yang mungkin tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Namun pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan yang stabil, jadi pemerintah daerah sudah cukup baik mengelola pengeluaran dengan semaksimal mungkin.

#### Laporan Arus Kas Sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan

##### 1. Likuiditas

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah cukup baik dalam menghasilkan kas yang cukup dari operasi sehari-hari untuk

memenuhi kewajibannya untuk membayar gaji pegawai dan lainnya. Arus kas dari aktivitas operasi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018-2021 yang positif mencerminkan likuiditas yang baik, sehingga pemerintah memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa harus meminjam atau menjual aset.

## 2. Solvabilitas

Berdasarkan hasil penelitian, kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah cukup baik dalam mengelola arus kas dari aktivitas pendanaan yang mencerminkan sejauh mana pemerintah bergantung pada utang untuk membiayai defisit anggaran dan investasi jangka panjang. Jika pemerintah daerah konsisten mengurangi ketergantungan pada pembiayaan eksternal dan menggunakan lebih banyak dana dari surplus anggaran untuk membiayai proyek-proyek baru atau untuk melunasi utang, ini dapat menunjukkan solvabilitas yang baik.

## 3. Fleksibilitas

Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara telah menyesuaikan arus kasnya dengan mengatur ulang anggaran, memprioritaskan pengeluaran yang lebih mendesak, dan mencari sumber pendanaan tambahan seperti dana cadangan. Pemerintah juga meningkatkan fleksibilitas keuangan dengan memperluas basis pajak, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu serta mengalokasikan dana untuk cadangan atau investasi, sehingga dapat dikatakan kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah cukup baik dalam mengelola laporan arus kas.

## 4. Akuntabilitas dan Transparansi

Berdasarkan hasil wawancara, laporan arus kas pemerintah daerah telah dialokasikan secara tepat dan efektif dengan memberikan gambaran yang jelas tentang sumber dan pengeluaran kas. Pemerintah daerah juga memantau arus kas secara berkala sehingga pemerintah dapat menghindari penundaan dalam pembayaran proyek penting atau dalam membayar kewajiban. Dengan ini, kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah cukup baik dalam mengelola laporan arus kas.

# KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis laporan arus kas sebagai alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil analisis arus kas dari aktivitas operasi terhadap total pendapatan, total pengeluaran dan arus kas bersih, kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah cukup baik dalam mengelola laporan arus kas.
2. Berdasarkan hasil analisis arus kas dari aktivitas investasi terhadap total pendapatan, total pengeluaran dan arus kas bersih, kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah cukup baik dalam mengelola laporan arus kas.
3. Berdasarkan hasil analisis arus kas dari aktivitas pendanaan terhadap total pendapatan, total pengeluaran dan arus kas bersih, kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah cukup baik dalam mengelola laporan arus kas.
4. Berdasarkan hasil analisis arus kas dari aktivitas transitoris terhadap total pendapatan, total pengeluaran dan arus kas bersih, kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah cukup baik dalam mengelola laporan arus kas.
5. Berdasarkan hasil analisis likuiditas, kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah cukup baik dalam mengelola laporan arus kas.
6. Berdasarkan hasil analisis solvabilitas, kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah cukup baik dalam mengelola laporan arus kas.
7. Berdasarkan hasil analisis fleksibilitas keuangan, kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah cukup baik dalam mengelola laporan arus kas.



8. Berdasarkan hasil analisis akuntabilitas dan transparansi, kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah cukup baik dalam mengelola laporan arus kas.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi institusi tempat penelitian, pemerintah daerah harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap laporan arus kas untuk memastikan kualitas dan keandalan laporan arus kas, agar bisa membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dan risiko keuangan yang perlu diperbaiki.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama diharapkan dapat mengembangkan indikator kinerja yang lebih menyeluruh berdasarkan laporan arus kas untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan. 2023. *BPK serahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kota seprovinsi Sulawesi Utara*. Diambil kembali dari Badan Pemeriksa keuangan : <https://sulut.bpk.go.id/>
- Dwi Nurrahmawati, Erni Agustin, dan Risma Wira Bharata. 2023. *Analisis Laporan Arus Kas Sebagai Alat Ukur Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2018-2021*. *Public Service and Governance Journal* 4(1): 93-103.  
<https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/psgj/article/view/812/743>
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2019. *Modul Level Dasar (CAFB) Akuntansi Keuangan*. Edisi 2019. Jakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Pramudiana. Y. 2018. *Sistem Akuntansi Publik*. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Republik Indonesia, Jakarta.
- Siti Hasanah, Khaerul Umam, dan Fitri Pebriani Wahyu. 2022. *Analisis Laporan Arus Kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018-2020*. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah* 4(3): 15-24.  
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ministrate/article/view/19234/pdf>
- Siswanto dan Dita Asri Malyani. 2022. *Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* Vol. 11 No. 1: 130-138.  
<https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/48423/17463>
- Susilawati D., Kusumastuti Wardana L dan Fajar Rahmawati. 2018. *Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan Studi Kasus BKAD Sleman Jati*. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 1(2): 91-98.  
<http://journal.umy.ac.id/index.php/jati>
- Widodo T. dan Kusumawati A. 2020. *Evaluasi Likuiditas, Solvabilitas dan Fleksibilitas dalam Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Bantul*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* 15(2): 119-133.